ABSTRAK

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh

Veris Yunanda

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengamanatkan pembentukan *data protection authority* yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) diproyeksikan sebagai pengawas dan penegak hukum pelindungan data pribadi di Indonesia, sehingga LPPDP harus dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu urgensi pembentukan LPPDP serta tantangan pembentukan dari lembaga tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pembentukan LPPDP dalam memperkuat hukum pelindungan data pribadi di Indonesia melalui perbandingan hukum dan praktik di negara Hongkong dan Singapura serta mengetahui peluang dan tantangan pembentukan LPPDP di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan LPPDP yaitu memperkuat hukum pelindungan data pribadi secara efektif melalui jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, dalam hal ini dengan memastikan bahwa LPPDP menjadi otoritas yang memiliki independensi sehingga tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Dengan demikian, pembentukan LPPDP menjadi instrumen fundamental dalam penegakan dan pelindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Pembentukan LPPDP di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti model kelembagaan LPPDP apakah dibentuk dengan *single supervisory authority* ataupun *ministry based-models*, serta batasan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sehingga perlu kajian analisis yang mendalam demi menciptakan lembaga yang mandiri dan memiliki independensi.

Kata Kunci: Data Pribadi, Lembaga Pelindungan Data Pribadi, UU N0 27
Tahun 2022